

IJRS
Indonesia Judicial Research Society

PROFIL

INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY (IJRS)

Mendorong reformasi kebijakan, tata kelola lembaga yang baik, dan perlindungan kelompok rentan yang berbasiskan bukti

TENTANG KAMI

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan pada tahun 2018 dengan komitmen kuat untuk mendorong reformasi hukum dan sosial di Indonesia melalui riset berbasis bukti, advokasi, dan edukasi publik. Sebagai organisasi masyarakat sipil yang independen, IJRS memposisikan dirinya sebagai penghubung sekaligus pencari solusi yang bekerja secara kolaboratif dengan institusi pemerintah, koalisi masyarakat sipil, dan komunitas untuk memajukan prinsip keadilan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kegiatan IJRS berfokus pada empat bidang utama. Pertama, dalam reformasi sistem peradilan pidana dan kebijakan hukum, IJRS melakukan penelitian dan advokasi yang mendalam untuk mendukung perbaikan di berbagai isu seperti hukum narkotika, keadilan restoratif, hukuman mati, serta pengembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua, dalam ranah kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), IJRS secara aktif mendorong kerangka hukum dan kebijakan yang memperhatikan hak dan kebutuhan kelompok rentan, termasuk penyintas kekerasan seksual, anak yang berisiko menikah dini, penyandang disabilitas, dan komunitas terpinggirkan lainnya.

Bidang ketiga adalah penguatan tata kelola yang baik dalam sistem hukum. IJRS meyakini bahwa perlindungan hukum yang berkualitas harus ditopang oleh institusi yang kapabel dan transparan. Oleh karena itu, IJRS mendukung inisiatif reformasi dalam penegakan hukum, perencanaan kelembagaan, penganggaran berbasis kebutuhan, dan praktik pemerintahan terbuka.

Terakhir, IJRS berkomitmen untuk meningkatkan akses terhadap keadilan dengan melakukan asesmen kebutuhan hukum, memperkuat pelaksanaan bantuan hukum, memberdayakan masyarakat, serta memantau efektivitas layanan hukum dan pelaksanaan kebijakan. Melalui prinsip inti *Discovering Justice,* IJRS berkomitmen untuk terus menghasilkan bukti, membangun kolaborasi yang inklusif, dan memastikan bahwa sistem hukum Indonesia berkembang sejalan dengan kebutuhan dan realitas masyarakatnya.

IJRS dibentuk sebagai Badan Hukum Perkumpulan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014462.AH.01.07.Tahun 2018



VISI MISI

Visi:
IJRS sebagai lembaga think tank terdepan yang inklusif dan berintegritas untuk mewujudkan sistem hukum Indonesia yang adil, transparan, rasional, dan aksesibel bagi semua.

Misi:
Meningkatkan kualitas dan dampak riset: Melakukan riset hukum yang berkualitas, inovatif, dan multidisiplin, serta menerapkan metode riset yang beragam untuk menghasilkan bukti yang kuat dalam mendukung transformasi sistem hukum di Indonesia.

Meningkatkan profesionalisme kelembagaan: Membangun sistem dan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia baik di internal IJRS maupun di eksternal (aparatur penegak hukum dan non-penegak hukum).

Mewujudkan advokasi kebijakan berbasis bukti: Mendorong perubahan kebijakan berdasarkan hasil riset dan bukti yang kuat, serta melakukan advokasi yang efektif dan berdampak untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan rasional.


Rapat Sekretariat Bersama OGI:
Perkembangan pelaksanaan OGI dan
Pembahasan Rencana Kegiatan OGI




Pelatihan
Peningkatan Kapasitas Advokat PERADI


KONFERENSI NASIONAL KEADILAN RESTORATIF
"Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia
dengan Keadilan Restoratif"




ASIA PACIFIC NETWORK
PEER LEARNING EXPERIENCE
BANDUNG, INDONESIA
26-28 JUNE 2024


DISEMINASI HASIL PENELITIAN
PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA
PASCA BERLAKUNYA KUHP 2023
Kamis, 4 Juli 2024
09.00 WIB - Selesai
The Royal Kuningan







AREA KERJA KAMI



Kami memiliki 4 (empat) area kerja utama yaitu:

1 Reformasi sistem peradilan pidana dan kebijakan hukum

Kami berkolaborasi bersama dengan pemerintah dan koalisi masyarakat sipil untuk mendorong adanya perbaikan kepada hukum pidana seperti di isu narkotika, keadilan restoratif, hukuman mati, hingga KUHP dan KUHAP, serta kebijakan di isu-isu perdata dengan basis bukti.





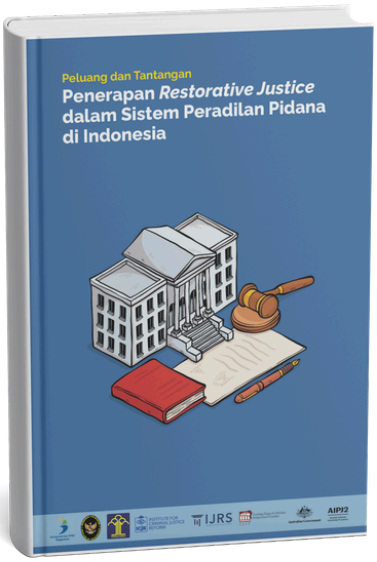



Semua publikasi kami dapat diunduh melalui web ijrs.or.id atau scan QR code di samping

AREA KERJA KAMI



2 Perlindungan terhadap kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)

Kami bersama dengan pemerintah dan jaringan masyarakat sipil terus mendorong adanya penguatan kebijakan dan perspektif yang mengakomodir kebutuhan dan kondisi kelompok rentan berkaitan dengan isu kekerasan seksual, perkawinan anak, akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, hingga kelompok minoritas lainnya.

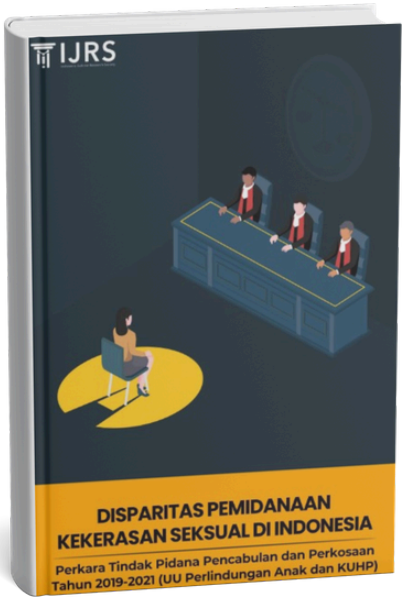

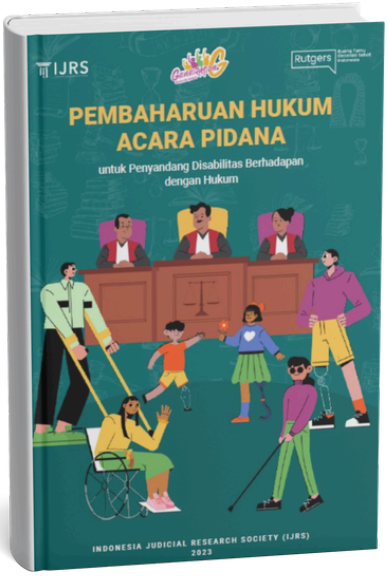





Semua publikasi kami dapat diunduh melalui web ijrs.or.id atau scan QR code di samping

AREA KERJA KAMI



3 Perbaikan tata kelola lembaga pemerintahan

Kami percaya bahwa adanya perlindungan dan penegakan hukum yang baik berawal dari lembaga hukum yang berkualitas dan profesional. Kami terus berupaya untuk mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik bagi penegakan hukum, perencanaan kerja institusi, anggaran berbasis kebutuhan, hingga keterbukaan pemerintah.



4 Meningkatkan akses terhadap keadilan

Kami terus berupaya untuk mengukur kondisi kebutuhan hukum menekankan kepada kebutuhan masyarakat dan akses keadilan di Indonesia demi mendorong perluasan akses kepada keadilan. Hal ini dilakukan melalui penguatan implementasi bantuan hukum, pemberdayaan hukum bagi masyarakat, hingga monitoring dan evaluasi terhadap implementasi layanan hukum secara lebih tepat sasaran.



Untuk RAN OGI 2023-2024 dapat diakses melalui QR code di samping

#DISCOVERING JUSTICE

Melalui prinsip *Discovering Justice*,
IJRS berkomitmen untuk tidak berhenti
mencari bukti dan solusi, serta mendorong
kolaborasi yang bermakna untuk...

menjawab berbagai permasalahan hukum dan sosial di Indonesia secara tepat sasaran dan mengedepankan kebutuhan masyarakat



IJRS DARI MASA KE MASA

2019



Peluncuran Indeks Akses terhadap Keadilan pertama di Indonesia, dan juga pertama di Asia, IJRS bekerja sama dengan Bappenas, Indonesian Roundtable Legal (ILR), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

2020



IJRS yang tergabung dalam Anggota Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen untuk mendukung pencegahan perkawinan anak dengan menerapkan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan. Hal tersebut tertuang dalam **Buku Saku Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yang disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung.**

2021



IJRS bersama dengan MaPPI dan berbagai mitra pembangunan telah mengasisteni Tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam **menyusun dan meluncurkan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.**

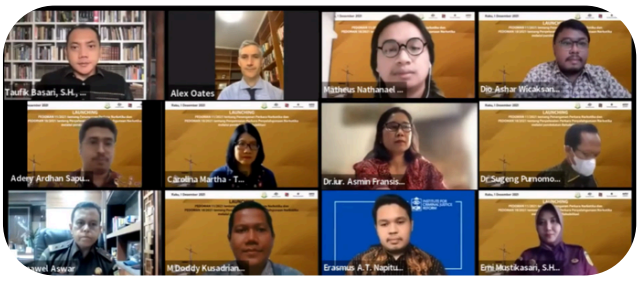

IJRS tergabung dalam Pokja Akses Keadilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengasisteni penyusunan **Pedoman Kejaksaan tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif** sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

IJRS DARI MASA KE MASA

2022



Demi mewujudkan reformasi kebijakan tindak pidana narkotika, IJRS membuat **riset terkait disparitas dan penanganan perkara tindak pidana narkotika.** Riset ini juga menyusun dan memberikan sejumlah rekomendasi penting mengenai kebijakan narkotika seperti apa yang baik untuk diimplementasikan di Indonesia serta perlunya ada pedoman pemidanaan.



IJRS bersama HopeHelps Network bersama-sama **menciptakan ruang diskusi terkait realitas kekerasan seksual serta kehadiran dua regulasi terbaru** yang dapat dikatakan sebagai angin segar untuk penanganan kekerasan seksual di Indonesia yaitu **Permendikbud-Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.** Acara ini dihadiri oleh Kemendikbud, KemenPPA, Kalis Mardiasih, Anya Canina, Akademisi FH UI, dsb.

2023



IJRS mengasisteni Kejaksaan RI sehingga **diluncurkannya Pedoman Kejaksaan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan"** sebagai komitmen dalam penguatan akses terhadap keadilan bagi Penyandang Disabilitas.

2024



IJRS membuat sebuah riset terkait **"Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023"** yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyesuaian - penyesuaian yang perlu dilakukan oleh hukum acara pidana setelah berlakunya KUHP 2023.



IJRS terlibat dalam kegiatan **High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships 2024 (HLF MSP 2024)** yang diadakan oleh Bappenas. IJRS berkesempatan menyelenggarakan 2 (dua) side event, yaitu "Innovative Budgeting for Justice: The Comprehensive Cost of Crime Approach" dan "Innovative Financing to Accelerating SDGs 16 In Indonesia".

IJRS DARI MASA KE MASA

2025



Publikasi Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda (Versi Berbasis Web) melalui katahukum.id/kuhapbelanda
Dengan dukungan peneliti senior LeIP, IJRS menerbitkan terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda dalam format daring sebagai bahan referensi perbandingan hukum sekaligus kontribusi bermakna bagi upaya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia Tahun 1981. Terjemahan ini dapat diakses secara terbuka oleh publik dan akan diperbarui secara berkala untuk mendukung kebutuhan penelitian serta pengembangan pengetahuan publik dalam jangka panjang.



IJRS menyelenggarakan **debat publik akademik antara perwakilan Kejaksaan dan Kepolisian mengenai sejumlah isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP.** Isu yang dibahas meliputi mekanisme pengaduan terhadap laporan tindak pidana yang tidak ditindaklanjuti, pengawasan hakim terhadap penahanan, mekanisme checks and balances antara jaksa dan penyidik dalam proses penyidikan, serta mekanisme checks and balances dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice).

Selain menjadi bagian dari upaya advokasi publik untuk mendorong pembaruan hukum acara pidana, debat ini juga bertujuan menghidupkan kembali budaya debat akademik di lingkungan kampus.



Bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum, **peneliti IJRS melaksanakan pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2024 menggunakan anggaran Tahun 2025.** IPH merupakan instrumen pengukuran yang sistematis dan berbasis bukti untuk menilai capaian pembangunan hukum, manfaatnya bagi masyarakat, serta kinerja program-program yang mendukung terwujudnya sistem hukum nasional yang berkeadilan.

Pengukuran IPH Tahun 2024, yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan siklus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, dilakukan melalui pengumpulan data komposit dari 15 kementerian dan lembaga, survei publik terhadap 1.361 responden, serta wawancara dengan 10 ahli dari kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil.

Hasil pengukuran menunjukkan skor IPH sebesar 0,68 dengan kategori baik. Namun, capaian tersebut masih stagnan dibandingkan dengan hasil pengukuran tahun 2023.

“IJRS menjadi lembaga masyarakat sipil yang dapat selalu memberikan dampak positif, mengedepankan riset yang akuntabel, serta mendorong perubahan kebijakan untuk Indonesia yang lebih maju”

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
(Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia)

“IJRS ini memiliki peran penting dalam reformasi hukum di Indonesia, karena selalu memberikan masukan-masukan yang konstruktif, dan sudah jelas reformatif”

Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M.
(Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia)

“Semoga di tahun-tahun kedepan IJRS bisa makin efektif menjadi *“hub”* bagi bertemunya berbagai gagasan yang muncul dari kegelisahan sekaligus kepedulian akan sistem hukum dan peradilan di Indonesia”

Binziad Khadafi, S.H., LL.M., Ph.D
Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia

“Salah satu masyarakat sipil yang telah berkontribusi secara baik adalah IJRS. Berbagai capaian telah diraih berkat adanya dukungan dan peran aktif dari IJRS, hingga diraihnya Open Government Partnership Award tahun 2023”

Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN

“Bekerja sama dengan teman-teman IJRS itu menyenangkan karena terdiri dari orang-orang yang hidupnya memang terpanggil untuk melakukan penelitian”

Nancy Sunarno
Head of Program Rutgers Indonesia

“IJRS memberikan wawasan hukum untuk menyelesaikan permasalahan di isu perempuan dan penyandang disabilitas. IJRS juga memiliki hubungan kerja yang baik dengan Kejaksaan dan Mahkamah Agung”

Craig Ewers
Team Leader AIPJ2

Sumber: IJRS TV - Bagaimana kesan dan pesan dari mitra selama #BerdampakBer5ama IJRS



IJRS sebagai perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia menerima pengharagaan bersama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM, menerima penghargaan Juara 1 se-Asia Pasifik di OGP Global Summit 2023 di Tallinn, Estonia pada isu Perluasan Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan.



IJRS menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai Mitra Kerja Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam hal kolaborasi dan kerja sama untuk mendorong akses keadilan dan advokasi berbasiskan bukti bagi peningkatan perlindungan kelompok rentan di Indonesia.

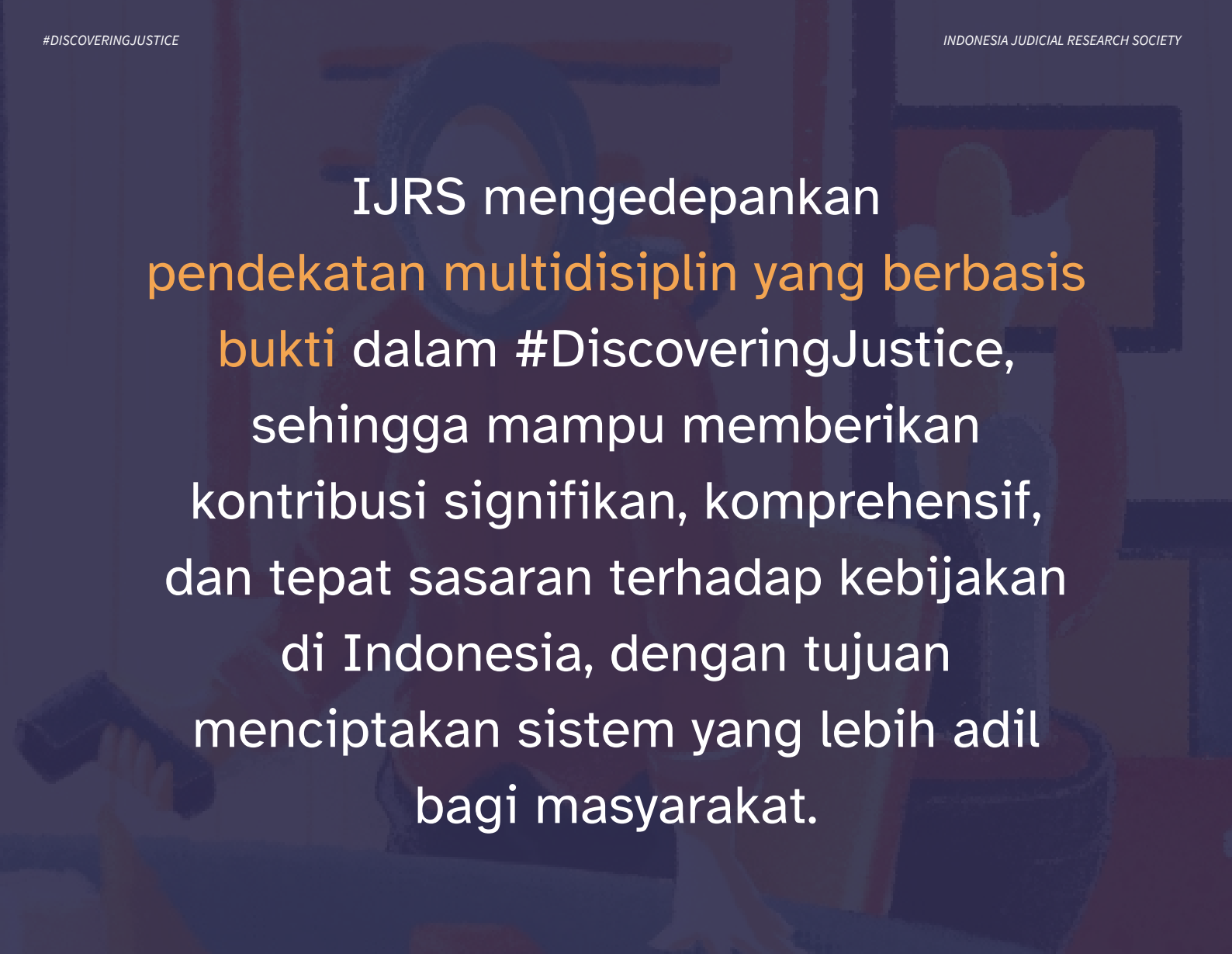

IJRS mengedepankan pendekatan multidisiplin yang berbasis bukti dalam #DiscoveringJustice, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan, komprehensif, dan tepat sasaran terhadap kebijakan di Indonesia, dengan tujuan menciptakan sistem yang lebih adil bagi masyarakat.

BAGAIMANA KAMI MENCIPTAKAN SISTEM YANG LEBIH ADIL BAGI MASYARAKAT?

Kami berupaya bersama dengan para mitra kami dalam hal:

penelitian hukum, advokasi hukum, dan edukasi hukum



PENELITIAN HUKUM

Kami melakukan riset, pemantauan, dan evaluasi terhadap fenomena dan kebijakan hukum maupun sosial sebagai acuan untuk reformasi kebijakan melalui basis bukti yang komprehensif. Harapannya hasil riset, pemantauan, dan evaluasi kami dapat menjadi landasan data dan fakta kondisi di masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran.

Riset dan kajian di isu narkotika

- Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia
- Asesmen Penerapan Pedoman Kejaksaan terkait Penanganan Perkara Narkotika (Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021) oleh Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
- Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023
- *Cost of crime and criminal justice in drug offenses*
- Tinjauan Hukum Undang Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Di Indonesia
- Peluang dan Tantangan Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
- Faktor-faktor Penentu Hukuman Mati di Indonesia: Sebuah Indikator

Riset dan kajian di sektor Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI):

- Disparitas Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan dan Tindak Pidana Perkosaan
- Laporan Penelitian Survei Kebutuhan Hukum Bagi Kelompok Rentan 2022
- Peran Pemberdayaan Hukum oleh Komunitas dalam memperkuat Akses Keadilan Untuk Perempuan Berhadapan dengan Hukum Di Indonesia
- Kajian UU TPKS, KUHP Baru terkait dengan Penanganan Perempuan & Anak bagi Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan RI
- Pembaharuan Hukum Acara Pidana untuk Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum
- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perempuan & Anak di Mahkamah Agung dan Kejaksaan RI

Riset dan kajian di sektor akses terhadap keadilan:

- Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum
- Keterbukaan Informasi Bantuan Hukum untuk Akses Keadilan yang Lebih Luas: Sebuah Kajian terhadap Portal Online Penyedia Informasi Bantuan Hukum
- Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia
- Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia
- Indeks Hak Asasi Manusia
- Survei Kebutuhan Hukum di Lampung dan Sulawesi Selatan

Riset dan kajian di sektor tata kelola lembaga pemerintahan:

- Kebutuhan Anggaran Bantuan Hukum yang Berperspektif Kelompok Rentan
- Penelitian untuk Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara Melalui Penganggaran Berbasis Kinerja (BPK) di Kejaksaan RI
- Analisis Jabatan dan Beban Kinerja Kejaksaan RI
- Kajian Pengelolaan Dana Pemulihan Lingkungan Hidup
- Kajian Pengelolaan Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund)*
- Kajian Kelembagaan Hukum di Indonesia untuk Penguatan RPJMN

ADVOKASI HUKUM

Kami melakukan advokasi dalam hal mengasisteni kepada Kementerian dan Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya, serta berkoalisi bersama berbagai organisasi masyarakat sipil.



Advokasi dalam sektor reformasi hukum pidana:

- Mengasisteni Kejaksaan RI dalam penyusunan Pedoman Penuntutan No. 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotik di Kejaksaan.
- Mengasisteni Mahkamah Agung RI dalam penyusunan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
- Mengasisteni Mahkamah Agung RI dalam penyusunan Peraturan Mahkamah Agung terkait Pedoman Mengadili dan Pemidanaan Perkara Narkotika
- Anggota Kelompok Kerja di Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kemenkopolhukam di bidang narkotika, terorisme, anti-korupsi, keadilan restoratif, e-court, dsb
- Koalisi masyarakat sipil untuk isu narkotika, keadilan restoratif dan anti hukuman mati

Advokasi dalam sektor tata kelola lembaga pemerintahan:

- Mengasisteni Penyusunan Rencana Strategis Komnas HAM
- Mengasisteni Perumusan Peraturan Internal Kejaksaan RI terkait Kode Etik, Manajemen Kepegawaian dsb.
- Koordinator Sekretariat Nasional Masyarakat Sipil untuk Open Government Indonesia
- Steering Committee Open Government Indonesia
- Mengasisteni Penguatan RPJMN untuk Kejaksaan RI
- Mengasisteni Kementerian PPN/Bappenas RI untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden terkait Keterbukaan Pemerintah Indonesia

Advokasi dalam sektor Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI):

- Mengasisteni Kejaksaan RI dalam penyusunan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.
- Mengasisteni Kejaksaan RI dalam penyusunan Pedoman Kejaksaan No. 2 tahun 2023 terkait Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
- Satuan Tugas dan Koalisi Masyarakat Sipil dalam mendorong disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Koordinator Koalisi 18+ untuk Pencegahan Perkawinan Anak
- Advokasi Penyusunan Rancangan Undang-Undang Anti-Diskriminasi
- Anggota kelompok kerja Perempuan dan Anak di Mahkamah Agung RI
- Anggota Kelompok Kerja Akses Keadilan di Kejaksaan RI

Advokasi dalam sektor akses terhadap keadilan:

- Mengasisteni Kementerian PPN/Bappenas RI dalam pengukuran capaian pembangunan hukum untuk RPJMN
- Mengasisteni BPHN, Kementerian Hukum dan HAM untuk penguatan standar layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan
- Koalisi masyarakat sipil untuk penguatan Revisi Undang-Undang Bantuan Hukum
- Advokasi Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) untuk mendorong keterbukaan data kriminal
- Anggota kelompok kerja akses keadilan di Kejaksaan RI

EDUKASI HUKUM

Kami melakukan diseminasi produk pengetahuan, kampanye, peningkatan kapasitas, serta pemberdayaan hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Edukasi hukum di sektor reformasi hukum pidana:

- Kampanye dan edukasi publik terkait reformasi kebijakan narkotika untuk menjamin ketersediaan narkotika demi kepentingan kesehatan serta perkembangan ilmu pengetahuan
- Kampanye nasional di isu RKUHP
- Kampanye bersama di isu keadilan restoratif
- Pelatihan kepada jaksa untuk pelaksanaan pedoman terkait keadilan restoratif
- Kampanye nasional di isu anti-hukuman mati

Edukasi hukum di sektor akses terhadap keadilan:

- Pelatihan kepada pemberi bantuan hukum untuk Standar Layanan OBH bersama Kementerian Hukum dan HAM
- Kampanye media sosial terkait keterbukaan pemerintah Indonesia
- Kampanye media sosial terkait data dan fakta akses keadilan di Indonesia

Edukasi hukum di sektor Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI):

- Peningkatan kapasitas pemberi bantuan hukum untuk pendampingan kelompok rentan
- Peningkatan kapasitas advokat dalam implementasi UU terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Pengembangan portal data dan informasi hukum: KataHukum.id
- Kolaborasi kampanye bersama koalisi masyarakat sipil di media sosial untuk isu kekerasan seksual, pencegahan perkawinan anak, dsb.
- Pemberdayaan hukum kepada perempuan di desa
- Gerakan penguatan pemberdayaan masyarakat di regional ASEAN
- Pelatihan kepada jaksa dan hakim untuk penguatan penanganan perempuan & anak di peradilan



MEWUJUDKAN KAPASITAS LEMBAGA YANG KUAT

Dalam upaya **#DiscoveringJustice**, kami terus berupaya untuk menjamin profesionalitas, integritas, disiplin, produktivitas, dan semangat kolaborasi di dalam internal lembaga kami. Kami percaya bahwa lembaga yang kuat akan menghasilkan produk yang berkualitas.

Keberagaman & Kesetaraan

Pekerja kami terdiri dari berbagai macam latar belakang pendidikan, tidak terbatas hanya dari lulusan bidang Hukum, termasuk juga bidang Sosial dan Manajemen. Mayoritas dari kami juga adalah perempuan, di mana ini menunjukkan komitmen kami untuk mendorong kesetaraan di lingkungan kerja. Dewan pengawas, Dewan Pengurus, Anggota Pakar hingga Peneliti Rekanan kami juga kini menjadi *champion* di berbagai sektor seperti sebagai akademisi, teknokrat, hingga aktor mitra pembangunan,

Panduan Internal Lembaga

Kami memiliki AD/ART kelembagaan, serta berbagai Standard Operating Procedure (SOP) seperti dalam hal rekrutmen, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, dsb. Tidak hanya itu, kami juga berupaya menjamin lembaga yang berintegritas melalui berbagai *safeguarding policy* seperti anti-kekerasan seksual, anti penyuapan dan penipuan, kode etik, dsb. Termasuk memastikan pengelolaan pengetahuan lembaga berkelanjutan dan sistematis.

Peningkatan Kapasitas

Dalam memastikan kapasitas personil yang terus relevan dan meningkat sesuai keahliannya, kami memastikan adanya peningkatan kapasitas secara berkala kepada personil baik melalui pertukaran pengetahuan di pertemuan internal, pelatihan tematik, hingga pelatihan tersertifikasi.

Jaminan Kesejahtaraan

Produktivitas dan kesejahteraan personil juga merupakan hal yang kami turut prioritaskan dan upayakan melalui *team bonding* secara berkala, pelibatan dalam asuransi kesehatan, hingga memastikan tunjangan atau insentif yang berkeadilan.

Akuntabilitas Lembaga

Kami terus berupaya untuk menjamin akuntabilitas lembaga dengan menyampaikan laporan tahunan dan hasil audit laporan keuangan secara berkala kepada pihak terkait dan juga publik melalui *website* kami. Hasil audit kami 3 tahun terakhir memperoleh hasil Wajar Tanpa Pengecualian.



EXPERT PARTNER



Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M.

Beliau pernah menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan di Kementerian PPN/Bappenas. Beliau juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kepala OIKN dan saat ini sebagai Akademisi di UPN Veteran



Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.

Beliau pernah menjabat sebagai kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kini Beliau aktif sebagai ahli hukum perbankan dan Akademisi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia



Theodora Yuni Shah Putri, Ph.D

Beliau adalah akademisi di Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau baru saja menyelesaikan studi Doktor di Australian National University dan berfokus di isu-isu perlindungan perempuan



Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si.

Beliau merupakan akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau tergabung dalam berbagai penelitian di bidang hukum dan sosial khususnya untuk memastikan akses terhadap keadilan, hingga perlindungan perempuan



Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.

Beliau merupakan *Assistant Professor* di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sejak tahun 2015. Sejak tahun 2023, beliau telah diakui sebagai ahli oleh Transparency International dan termasuk dalam Jaringan Pakarnya.



Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H.

Beliau merupakan Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI). Di Universitas Brawijaya Beliau dipercaya menjadi Ketua Badan Pengurus Persada Universitas Brawijaya



Dr. Alfindra Primaldhi, B.A., S.Psi., M.Si.

Beliau adalah Peneliti di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau berpengalaman sebagai konsultan dalam pengembangan Indeks Pembangunan Hukum & Indeks Akses Keadilan di Kementerian PPN/Bappenas RI



Dr. Paksi C.K Walandouw, S.E., M.A.

Beliau adalah Wakil Kepala Bidang Penelitian di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Principal Investigator dalam beberapa proyek pengukuran demografi di Indonesia

ADVISORY BOARD



Meissy Sabardiah, S.H., LL.M.
(Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan)

Beliau pernah terlibat dalam Tim Reformasi Peradilan Mahkamah Agung Indonesia. Dengan keterampilan yang kuat dalam manajemen, perencanaan strategis, dan advokasi kebijakan, Beliau telah memberikan wawasan berharga di bidang hukum, keadilan, dan anti-korupsi



Hasril Hertanto, S.H., M.H.

Beliau menjabat sebagai Akademisi di Fakultas Hukum Indonesia. Beliau adalah salah satu pendiri Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) pada tahun 2000, dan dipercaya sebagai Ketua MaPPI-FHUI dari tahun 2006 hingga 2018



Dr. Wiwiek Awiati, S.H., M.H.

Beliau aktif sebagai Akademisi dalam bidang Hukum Lingkungan, Klinik Hukum Lingkungan, Penyelesaian Sengketa, Klinik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, dan Klinik Street Law di Fakultas Hukum Universitas Indonesia

MANAGEMENT BOARD



Choky Risda Ramadhan, Ph.D
(Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan)

Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Harian MaPPI FHUI 2012 - 2018. Beliau baru saja menyelesaikan studi Doktor di University of Washington dan kini aktif sebagai akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia



Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A., Ph.D (cand.)

Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif IJRS 2019 - 2023. Selain itu beliau juga adalah akademisi di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa dan saat ini sedang menempuh S3 di Australian National University



Nisa Istiani, S.H., M.LI.

Beliau pernah menjadi Ketua Perkumpulan IJRS. Selain aktif dalam kegiatan pembaruan peradilan, Beliau juga aktif menjadi Akademisi di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia



Adery Ardhan Saputro, S.H., LL.M.

Beliau merupakan Plt. Direktur Eksekutif IJRS 2023 - 2024 dan juga akademisi di STIH Adhyaksa. Beliau aktif dalam dalam kerja-kerja bersama Kejaksaan RI dan reformasi hukum pidana di Indonesia



Bestha Inatsan Ashila, S.H.

Beliau merupakan Deputi Internal IJRS 2022 - 2024 dan juga seorang peneliti yang banyak mendalami isu-isu perlindungan kelompok rentan di sektor peradilan maupun dalam hal pemberdayaan masyarakat



Andreas Nathaniel Marbun S.H., LL.M.

Andreas merupakan Staf Ahli Kantor Staf Presiden. Beliau juga telah melakukan banyak penelitian yang kerap kali menghasilkan beberapa publikasi dengan dampak yang luas dan secara langsung digunakan oleh pemerintah untuk menjadi dasar pondasi dalam proses pembuatan kebijakan publik.

EXECUTIVE BOARD



Arsa Ilmi Budiarti, S.Sos

Direktur Eksekutif

Arsa merupakan lulusan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Arsa memiliki fokus dalam hal riset terkait akses terhadap keadilan melalui pendekatan kebutuhan masyarakat dan advokasi keterbukaan pemerintah di sektor keadilan. Arsa memiliki kemampuan dalam manajemen pengetahuan hingga program secara berkelanjutan



Matheus Nathanael, S.H., C.L.D.

Manajer Program untuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana

Matheus merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Matheus adalah peneliti dan konsultan perancangan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Matheus juga tergabung dalam berbagai kelompok kerja penyusunan peraturan kebijakan dan legislasi di Kementerian/Lembaga Negara, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.



Marsha Maharani, S.H.

Manajer Program untuk Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)

Marsha merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Marsha memiliki fokus dalam hal penguatan perlindungan bagi kelompok rentan (perempuan, anak, dsb.) dan pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Marsha memiliki kemampuan memberi edukasi hukum dan monitoring evaluasi kebijakan secara komprehensif sebagai masukan bagi perubahan kebijakan



Marselino H. Latuputty, S.H., M.H.

Manajer Program untuk Akses terhadap Keadilan & Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah

Marcel merupakan lulusan magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan peminatan Hukum Transnasional. Marcel memiliki fokus dalam hal asistensi Kementerian /Lembaga khususnya dalam perencanaan dan penganggaran negara. Marcel memiliki kemampuan dalam melakukan operasionalisasi arah dan tujuan pemerintah yang dapat dipastikan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat



Dian Saraswati, S.Ak.

Manajer Operasional

Dian merupakan lulusan Akuntansi di Universitas Pancasila. Dian memiliki fokus dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam lembaga baik dalam hal standar kompetensi, peningkatan karir, hingga pemetaan kebutuhan lembaga secara berkala. Dian memiliki kemampuan pengelolaan keuangan lembaga untuk memastikan operasional kantor berjalan dengan baik



Shofana Sekar Humairoh, S.M.

Manajer Sumber Daya Manusia

Shofana merupakan lulusan program sarjana Manajemen di Universitas Pancasila. Shofana memiliki kemampuan dalam hal perencanaan administrasi dan pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan program

TIM KAMI

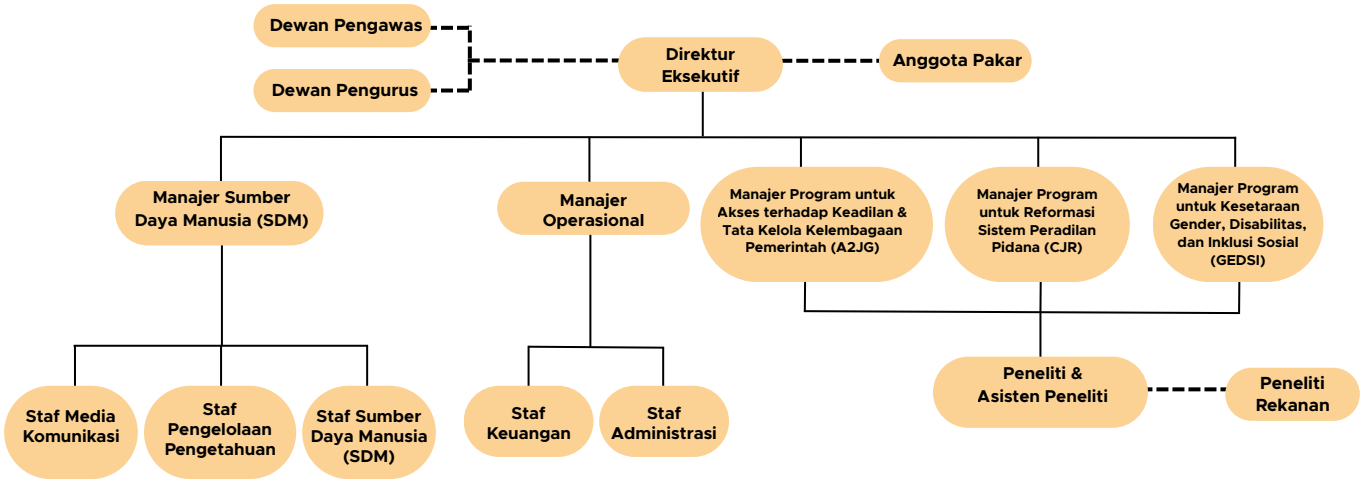

PROFIL TIM KAMI

JENIS KELAMIN

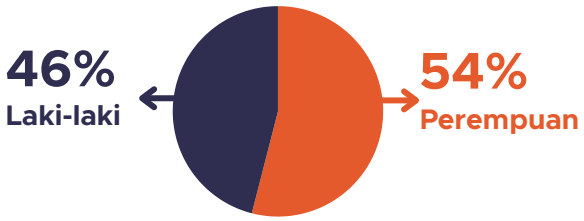

JENJANG JABATAN

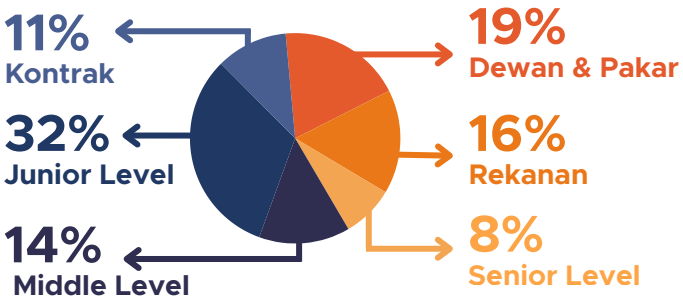

STATUS ANGGOTA

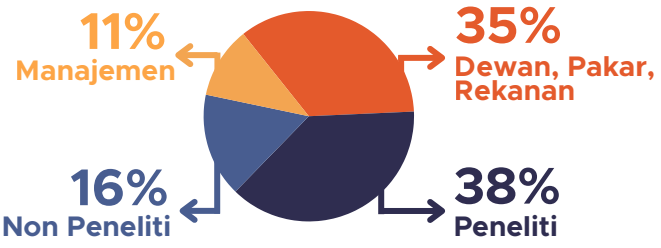

TINGKAT PENDIDIKAN

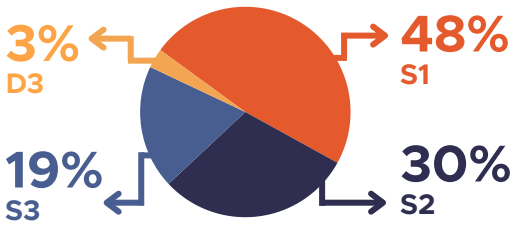

WILAYAH JANGKAUAN KAMI

Kami telah berupaya melakukan kerja-kerja dalam hal penelitian, advokasi, dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak hanya berada di level nasional, namun juga di level lokal, termasuk juga regional dan global:



01. Padang

- Pelatihan standar layanan bantuan hukum terhadap kelompok rentan bersama dengan PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan YLBHI
- Kajian Atas Penerapan PERMA 3/2017 di 5 Mitra Wilayah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) bersama dengan Komnas Perempuan dan MaPPI FH UI

02.Riau

Riset indeks akses terhadap keadilan 2019 bersama Bappenas, ILR, dan YLBHI

03. Kepulauan Riau

Kajian Atas Penerapan PERMA 3/2017 di 5 Mitra Wilayah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) bersama dengan Komnas Perempuan dan MaPPI FH UI

04. Lampung

- Riset kebutuhan anggaran bantuan hukum yang berperspektif kelompok rentan bersama PBHI, Asosiasi LBH Apik, dan YLBHI
- Survey Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019 bersama LBH Lampung

05. Bandung

- Advokasi bersama Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN)
- Asia Pacific Network: Peer Learning Experience bersama Bappenas

06.Jawa Tengah

- Kajian Atas Penerapan PERMA 3/2017 di 5 Mitra Wilayah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) bersama dengan Komnas Perempuan dan MaPPI FH UI

07.Madiun, Jawa Timur

Kunjungan & audiensi dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Open Government Indonesia (OGI) dan Pemerintah Kota Madiun sebagai OGP lokal

08.Bangkalan, Jawa Timur

- Asesmen Kebutuhan Hukum Masyarakat Desa bersama Yayasan Pekka
- Pemberdayaan Hukum: Memperkuat Akses Masyarakat terhadap Keadilan bersama Yayasan Pekka

09.Kalimantan Tengah

- Kajian Atas Penerapan PERMA 3/2017 di 5 Mitra Wilayah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) bersama dengan Komnas Perempuan dan MaPPI FH UI

10. Samarinda

- Pelatihan Peningkatan Standar Layanan Bantuan Hukum kepada Kelompok Rentan

WILAYAH JANGKAUAN KAMI



11. Bali

High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships 2024 (HLF MSP 2024) bersama Bappenas

12. Nusa Tenggara Barat

Riset indeks akses terhadap keadilan 2019 bersama Bappenas, ILR, dan YLBHI

13. Nusa Tenggara Timur

Riset kebutuhan anggaran bantuan hukum yang berperspektif kelompok rentan bersama PBHI, Asosiasi LBH Apik, dan YLBHI

14. Sulawesi Selatan

Survey Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019 bersama LBH Makassar

15. Sulawesi Tenggara

Riset indeks akses terhadap keadilan 2019 bersama Bappenas, ILR, dan YLBHI

16. Maluku

Kajian Atas Penerapan PERMA 3/2017 di 5 Mitra Wilayah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) bersama dengan Komnas Perempuan dan MaPPI FH UI

17. Papua Barat

Riset indeks akses terhadap keadilan 2019 bersama Bappenas, ILR, dan YLBHI

AREA JARINGAN / KOALISI

Kami juga tergabung dalam beberapa jaringan di level lokal, regional, dan global seperti:

- Koalisi 18+ (Nasional & Lokal)
- Grassroots Justice Network (Regional)
- Asean Justice Innovation Forum (Regional)
- Open Government Partnership (Global)
- Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (Nasional & Lokal)
- Koalisi Keterbukaan Pemerintah Indonesia (Nasional), dll.

*kegiatan kami secara lengkap & terkini bisa Anda lihat di web ijrs.or.id atau scan QR code di samping

MITRA KERJA KAMI

Sejak berdiri, kami terus berupaya untuk memberikan dampak positif bagi perubahan kebijakan. Ini dapat tercapai dengan dukungan dan kolaborasi bersama berbagai pihak.



IJRS DALAM ANGKA

Hingga tahun 2023, kami telah memiliki capaian berikut:

108 MITRA
telah berkolaborasi bersama kami

67 PUBLIKASI
telah kami terbitkan

16 KEBIJAKAN
telah direformasi

Diikuti oleh
+7.000 ORANG
di berbagai media sosial kami

+40.000 MASYARAKAT
telah kami jangkau melalui kegiatan offline maupun online

Menyebarluaskan pengetahuan di
+1000 KEGIATAN



Capaian kami selengkapnya dapat Anda akses di web ijrs.or.id atau scan QR code di samping

PRODUK PENGETAHUAN IJRS



Untuk membuka akses informasi dan data hukum seluas-luasnya, kami terus berupaya untuk mengemas serta membagikan produk pengetahuan yang dihasilkan, agar dapat menjadi acuan untuk penguatan kebijakan.

Unduh dan simak berbagai produk pengetahuan kami lebih lanjut dengan scan QR code berikut ini:

Publikasi ijrs.or.id

Youtube channel IJRS TV

PORTAL DATA & INFORMASI HUKUM:

KataHukum.id

Tidak dapat dipungkiri, akses terhadap informasi hukum masih menjadi hal yang sulit diperoleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal, keberadaan informasi hukum merupakan gerbang awal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses keadilan. Untuk itu, kami mengembangkan sebuah portal data dan informasi hukum bernama **katahukum.id**

Katahukum.id bertujuan untuk:

- Sebagai *one-stop platform* untuk memperoleh informasi hukum yang dapat diakses kapanpun di manapun oleh siapapun
- Memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum secara lebih terarah dan mudah dipahami
- Memperluas akses data-data penelitian hukum dan sosial baik kuantitatif maupun kualitatif

Katahukum.id merupakan portal yang diinisiasi oleh IJRS untuk dimanfaatkan dan dikelola secara kolektif bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya. Saat ini kami berkolaborasi dengan PEKKA, Asosiasi LBH APIK Indonesia, Rumah KitaB, ICJ Makassar, Sapda Jogja dan LBH Masyarakat.

Katahukum.id memiliki fitur utama:

- Pencarian jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Q&A)
- Penyajian data-data berdasarkan hasil penelitian
- Penyajian kompilasi informasi terarah secara tematis

Anda bisa mengakses katahukum.id melalui QR code berikut:



IJRS DALAM MEDIA

Media sosial telah menjadi salah satu sarana komunikasi yang efektif karena memungkinkan untuk menyebarluaskan informasi, meningkatkan kesadaran, dan membangun komunitas perihal isu-isu tertentu secara cepat dan luas.



Melalui media sosial kami pernah menyuarakan **kampanye media sosial #BayangkanJikaKamu** bersama ICJR, Aksi Keadilan, LBHM, Kontras, dan Love Frankie untuk mendorong alternatif pemidanaan yang lebih manusiawi di Indonesia karena narapidana juga manusia. Kami telah berhasil mencapai

2.406 DUKUNGAN

tanda tangan di change.org, hal ini melampaui jauh dari target kampanye yaitu mengumpulkan 1.000 dukungan tanda tangan.



Berkat media sosial, total sebanyak

35.000+ ORANG MENYAKSIKAN

video animasi kampanye bertajuk #AkuMauKamuTahu kolaborasi bersama Yasera Indonesia, Plan Indonesia, Sahabat Kapas, Rumah Faye, Zero Human Trafficking Network, SAFEnet, Bully.id, ICJ Makassar, Tanoker Ledokombo, dan KBR.id untuk memberikan edukasi terkait 9 jenis kekerasan seksual.

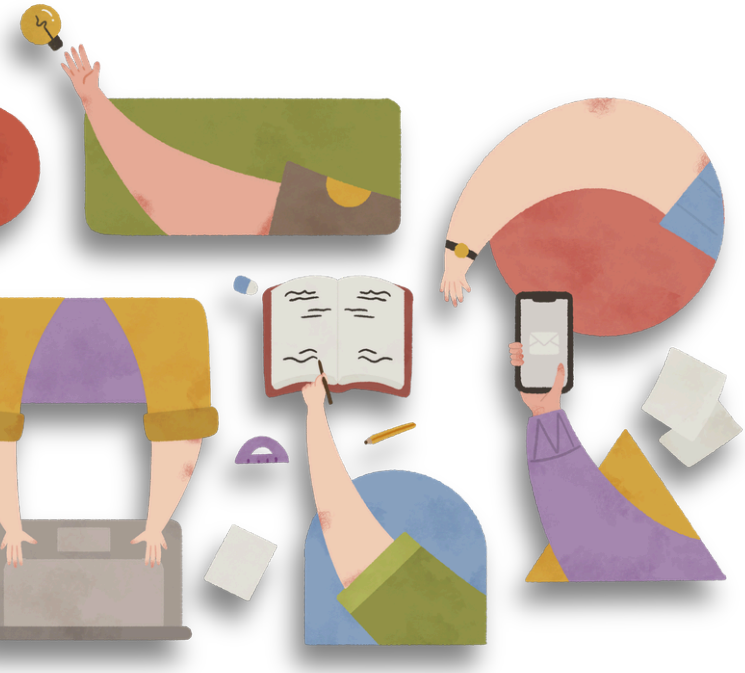



Sumber: Okezone News

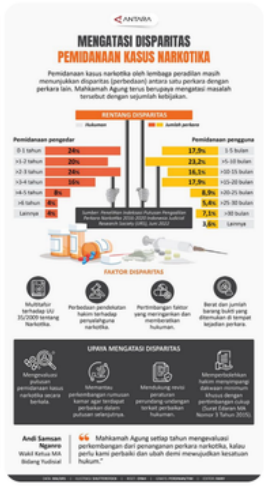

Sumber: Antara News

Media online pun juga menjadi **sarana untuk berbagi data-data hasil riset kami.** Contohnya Okezone & Antara menjadikan hasil riset kami sebagai infografis di portal media mereka.

TETAP TERHUBUNG DENGAN KAMI

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Komplek Pertanian, Jl. Palapa Timur No.6, RT.15/RW.5, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520

+62 821-2500-8141 (WhatsApp Chat Only)

office@ijrs.or.id

ijrs.or.id

@ijrs_official

@ijrs_official

@lifeatijrs

@IJRS TV

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)





Untuk mendapatkan berita terkini terkait IJRS, silakan berlangganan *newsletter* kami secara gratis.

Cantumkan email Anda melalui QR code berikut ini:


IJRS
Indonesia Judicial Research Society